Hayak Bamara: Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN 3047-5708
Volume 3 Nomor 2 (2025)

FASILITASI PENGUATAN VISI KOLEKTIF BUMDES SEBAGAI MOTOR PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT DI DESA KAMBIYAIN KABUPATEN BALANGAN

Nur Mila Sari[1], Ismar Hamid[1], Tri Febrima Hasanah[1], Rusma[1], Nurhikmah[1], Muhammad Alfin Rizky Fadillah[1], Ahmad Mu'min[1], Marfuah[1], Rifqi Adha Nabilah[1], Andi Maulida Melani[1], Fitri Khairunnisa[1], Muhammad Rafael Khaliq[1], Anang Suriani[2]
[1]*Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia*
[2]*Pemerintah Desa Kambiyain, Kecamatan Tebing Tinggi, Balangan, Indonesia*

Corresponding author:
Nur Mila Sari
nurmilasario93@gmail.com

Received (December 15, 2025), Accepted (December 29, 2025)

Keywords:
Village-owned enterprises (BUMDes); village empowerment; economic stagnation; collective vision

DOI:
https://doi.org/10.20527/hb.v3i2.706

ABSTRACT

Rural economic stagnation remains a structural problem faced by many villages in Indonesia, including villages that have relatively adequate natural and human resources, but are not yet supported by participatory and sustainable economic institutions. This condition is also experienced by Kambiyain Village, Tebing Tinggi District, South Kalimantan, where community economic activities are still carried out individually and have not been integrated into a village economic institution that has social and formal legitimacy. The absence of a collective potential management mechanism has implications for the limited economic added value that can be enjoyed equally by the village community. This community service program aims to strengthen the social and institutional foundations of the village economy through the development of a collective vision as a prerequisite for the establishment of a Village-Owned Enterprise (BUMDes). This community service activity was carried out using a participatory approach and qualitative descriptive methods, which lasted for 57 days, from July 17 to September 11, 2025. The stages of the activity included identifying community needs, mapping the potential and problems of the village, confirming initial agreements with stakeholders, conducting education-based socialization activities, utilizing inspirational media in the form of films on BUMDes best practices, and holding focus group discussions (FGD) as a space for community deliberation. The results of the program implementation showed the formation of a BUMDes management structure through an open recruitment mechanism and the formulation of a collective vision agreed upon by the community and the village government, which was then institutionalized in the Articles of Association and Bylaws (AD/ART). These findings confirm that educational and deliberative approaches play an important role in building social legitimacy, increasing community participation and sense of ownership, and strengthening the institutional foundations of the village economy as a prerequisite for the sustainability of BUMDes at the village level.

ABSTRAK

Stagnasi ekonomi pedesaan masih menjadi persoalan struktural yang dihadapi banyak desa di Indonesia, termasuk desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang relatif memadai, tetapi belum didukung oleh kelembagaan ekonomi yang terkelola secara partisipatif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut juga dialami oleh Desa Kambiyain, Kecamatan Tebing Tinggi, Kalimantan Selatan, di mana aktivitas ekonomi masyarakat masih berjalan secara individual dan belum terintegrasi dalam suatu kelembagaan ekonomi desa yang memiliki legitimasi sosial dan formal. Ketiadaan mekanisme pengelolaan potensi secara kolektif berimplikasi pada terbatasnya nilai tambah ekonomi yang dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat desa. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat fondasi sosial dan kelembagaan ekonomi desa melalui pembangunan visi kolektif sebagai prasyarat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan metode deskriptif kualitatif, yang berlangsung selama 57

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

hari, sejak 17 Juli hingga 11 September 2025. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat, pemetaan potensi dan permasalahan desa, pemantapan kesepakatan awal bersama pemangku kepentingan, kegiatan sosialisasi berbasis edukasi, pemanfaatan media inspiratif berupa film praktik baik BUMDes, serta forum diskusi kelompok terarah (FGD) sebagai ruang deliberatif masyarakat. Hasil pelaksanaan program menunjukkan terbentuknya struktur kepengurusan BUMDes melalui mekanisme rekrutmen terbuka serta tersusunnya rumusan visi kolektif yang disepakati bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa, yang selanjutnya dilembagakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan edukatif dan deliberatif berperan penting dalam membangun legitimasi sosial, meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan masyarakat, serta memperkuat fondasi kelembagaan ekonomi desa sebagai prasyarat keberlanjutan BUMDes di tingkat desa.

How to Cite:
Sari, N. M., Hamid, I., Hasanah, T. F., Rusma, Nurhikmah, Fadillah, M. A. R., Mumin, A., Marfuah, Nabilah, R. A., Melani, A. M., Khairunnisa, F., Khaliq, M. R., Suriani, A. (2025). Fasilitasi Penguatan Visi Kolektif BUMDes sebagai Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat di Desa Kambiyain Kabupaten Balangan. *Hayak Bamara: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3*(2), 170-181. https://doi.org/10.20527/hb.v3i2.706

This is an open access article under the CC BY-SA license.

A. PENDAHULUAN

Desa Kambiyain, Kecamatan Tebing Tinggi, Kalimantan Selatan, merupakan wilayah pedesaan yang aktivitas ekonominya bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, khususnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Secara konseptual, ketersediaan lahan dan sumber daya lokal tersebut dipandang sebagai modal dasar dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif masyarakat desa. Namun dalam praktiknya, keberlimpahan sumber daya alam tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketergantungan mayoritas warga Desa Kambiyain pada sektor pertanian dan perkebunan justru masih dihadapkan pada keterbatasan nilai tambah dan lemahnya mekanisme pengelolaan ekonomi secara kolektif, sehingga potensi ekonomi desa belum berkembang secara optimal dan keberlanjutan.

Namun demikian, potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Kambiyain belum sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kondisi geografis desa yang relatif terpencil memang berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap pasar, pendidikan, serta infrastruktur dasar, yang pada gilirannya memperlebar kesenjangan kesejahteraan dengan wilayah yang lebih berkembang (Anu et al., 2025). Keterbatasan akses tersebut berdampak pada rendahnya posisi tawar masyarakat desa dalam rantai nilai ekonomi, sehingga aktivitas produksi yang dijalankan masih didominasi oleh pola usaha berskala kecil dengan nilai tambah yang minim. Meskipun demikian, stagnasi ekonomi desa yang terjadi tidak dapat sepenuhnya direduksi sebagai persoalan geografis semata. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tanpa dukungan tata kelola dan kelembagaan ekonomi yang memadai, potensi sumber daya lokal cenderung tidak berkembang secara optimal dan berkelanjutan (Fikri Alfan et al., 2025).

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa sejatinya memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal. Namun kewenangan tersebut tidak selalu diikuti oleh kesiapan kelembagaan dan kapasitas pengelolaan yang memadai di tingkat desa. Keterbatasan akses terhadap informasi, rendahnya pengalaman pengelolaan usaha kolektif, serta belum terbentuknya kelembagaan ekonomi desa yang terstruktur menyebabkan pemanfaatan potensi lokal masih berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi. Akibatnya, aktivitas ekonomi masyarakat cenderung bersifat individual, berorientasi jangka pendek, dan belum diarahkan pada upaya

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara legitimasi normatif desa sebagai subjek pembangunan dengan kemampuan aktual dalam mengelola sumber daya ekonomi secara kolektif yang pada akhirnya menjadi faktor penghambat dalam mengoptimalkan potensi tersebut sebagai basis peningkatan kesejahteraan masyarakat (Marlina & Suwandi, 2024).

Dalam konteks Desa Kambiyain, persoalan tersebut tercermin secara konkret pada belum tersedianya kelembagaan ekonomi desa yang mampu mengelola potensi lokal secara kolektif dan berkelanjutan. Aktivitas ekonomi masyarakat masih berjalan secara individual, terfragmentasi, dan belum terintegrasi dalam suatu kelembagaan yang memiliki legitimasi sosial maupun formal. Ketiadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen ekonomi desa menyebabkan aset, potensi usaha, dan peluang ekonomi lokal belum diarahkan pada upaya penciptaan nilai tambah dan pemerataan manfaat secara sistematis. Padahal, secara konseptual BUMDes dirancang sebagai wadah pengelolaan aset dan usaha desa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penguatan solidaritas sosial, kemandirian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang hanya menitikberatkan pada pemenuhan aspek administratif dan struktural, tanpa diiringi proses pembangunan kesepahaman dan partisipasi masyarakat, cenderung menghadapi persoalan keberfungsian di tingkat lokal. BUMDes yang dibentuk secara prosedural, tetapi tidak bertumpu pada kebutuhan riil serta keterlibatan warga, berisiko kehilangan legitimasi sosial dan mengalami stagnasi usaha (Nuryana et al., 2025). Dalam kondisi tersebut, BUMDes kerap dipersepsikan semata sebagai proyek kelembagaan desa, bukan sebagai instrumen kolektif pengelolaan ekonomi masyarakat. Akibatnya, pengelolaan potensi desa tidak berjalan optimal dan manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak terdistribusi secara merata, sehingga tujuan awal pendirian BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa sulit tercapai (Fitriyani, 2025).

Merespons permasalahan tersebut, program pengabdian masyarakat ini dirancang dengan menempatkan pendekatan partisipatif sebagai strategi utama dalam membangun fondasi kelembagaan ekonomi desa. Pendekatan ini tidak diarahkan pada pembentukan BUMDes secara administratif semata, melainkan pada proses penguatan kesadaran, pengetahuan, dan kesepahaman kolektif masyarakat mengenai urgensi kelembagaan ekonomi desa. Penekanan pada proses sosial ini dipandang penting untuk memastikan bahwa BUMDes tumbuh dari kebutuhan riil masyarakat, memiliki legitimasi sosial yang kuat, serta mampu berfungsi sebagai instrumen pengelolaan potensi ekonomi desa secara berkelanjutan.

Pendekatan partisipatif dalam program ini dioperasionalkan melalui serangkaian proses yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan penguatan kelembagaan ekonomi desa. Proses tersebut meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat, pemetaan potensi dan permasalahan desa, pemantapan kesepahaman awal bersama pemangku kepentingan, kegiatan sosialisasi berbasis edukasi, pemanfaatan media inspiratif, serta forum diskusi kelompok terarah (FGD) sebagai ruang deliberatif. Rangkaian proses ini tidak semata dipahami sebagai tahapan teknis, tetapi sebagai mekanisme sosial untuk membangun dialog, memperkuat rasa kepemilikan, dan menumbuhkan akuntabilitas kolektif dalam perencanaan kelembagaan ekonomi desa. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan diarahkan untuk menyiapkan fondasi sosial dan kelembagaan yang diperlukan bagi keberlanjutan BUMDes di tingkat desa (Hardiyono & Tikupadang, 2023; Fernandes et al., 2023).

Secara teoretis dan empiris, berbagai kajian menegaskan bahwa keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal atau sumber daya alam, melainkan sangat bergantung pada kapasitas pengelolaan serta keterlibatan aktif masyarakat desa. BUMDes yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan ditopang oleh proses partisipatif sejak tahap perencanaan terbukti lebih adaptif, memiliki

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

legitimasi sosial yang kuat, serta berpeluang lebih besar untuk berkelanjutan dalam menjalankan fungsi ekonominya (Sundari et al., 2025). Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola yang akuntabel menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan BUMDes tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga mampu mengakomodasi kepentingan kolektif masyarakat desa (Machmud et al., 2025).

Kerangka normatif mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan BUMDes sebagai lembaga usaha yang dikelola dengan prinsip partisipasi, kemandirian, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Namun, mandat normatif tersebut tidak hanya mengafirmasi fungsi ekonomi BUMDes, melainkan juga mengandung dimensi sosial yang menuntut adanya pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dalam perspektif pemberdayaan, BUMDes diposisikan tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi sebagai lembaga sosial yang bertumpu pada proses edukasi, motivasi dan penguatan kapasitas kolektif masyarakat desa (Alwi et al., 2023; Sunaryono, 2024). Oleh karena itu, integrasi forum deliberatif dalam proses perencanaan kelembagaan dipandang penting sebagai mekanisme untuk menjembatani mandat normatif dengan praktik pengelolaan di tingkat lokal, sekaligus memperkuat legitimasi sosial serta keberlanjutan ekonomi desa (Pah et al., 2024; Setiawan, 2021).

Berdasarkan kerangka permasalahan dan pendekatan tersebut, artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis proses penguatan fondasi kelembagaan ekonomi desa melalui pendekatan partisipatif dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kambiyain. Fokus utama artikel ini diarahkan pada analisis proses sosial dan kelembagaan yang mendasari terbentuknya kesepahaman kolektif masyarakat. Kontribusi utama yang ditawarkan adalah pemaparan pengalaman pengabdian yang menekankan pentingnya perumusan visi kolektif sebagai prasyarat legitimasi sosial dan keberlanjutan kelembagaan BUMDes. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai penguatan kelembagaan ekonomi desa, khususnya dalam konteks pengabdian masyarakat yang berorientasi pada proses partisipatif dan pembangunan kelembagaan jangka panjang (Aditya, 2025).

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus aktor utama dalam seluruh tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa solusi yang dirumuskan tidak bersifat instruktif, melainkan tumbuh dari kebutuhan, pengalaman, serta aspirasi masyarakat Desa Kambiyain. Secara metodologis, kegiatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan proses pendampingan, dinamika sosial yang berkembang selama pelaksanaan kegiatan pengabdian, serta capaian kelembagaan berupa kesepakatan kolektif mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendekatan ini sekaligus membatasi fokus analisis pada proses sosial dan kelembagaan yang berkembang selama pelaksanaan kegiatan pengabdian, bukan pada pengukuran dampak ekonomi secara kuantitatif. Oleh karena itu, temuan yang dihasilkan bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke konteks desa lain.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Kambiyain, Kecamatan Tebing Tinggi, Kalimantan Selatan, selama 57 hari sejak tanggal 17 Juli 2025 hingga 11 September 2025. Rentang waktu tersebut mencakup tahapan identifikasi kebutuhan masyarakat, pemetaan potensi dan permasalahan desa, pemantapan kesepahaman awal bersama pemangku kepentingan desa, perancangan dan persiapan kegiatan sosialisasi, serta pelaksanaan sosialisasi berbasis media inspiratif dan forum diskusi kelompok terarah (FGD) sebagai ruang deliberatif. Lokasi kegiatan berpusat di Balai Adat Desa Kambiyain dan beberapa titik kegiatan masyarakat lainnya yang relevan, guna menjangkau partisipasi warga secara lebih luas.

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

Masyarakat Desa Kambiyain menjadi mitra utama sekaligus sasaran pengabdian ini, dengan keterlibatan aktif perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga desa yang berpartisipasi dari berbagai kelompok usia dan gender. Pendampingan diarahkan untuk mendorong partisipasi bermakna masyarakat dalam proses perumusan kelembagaan ekonomi desa, khususnya dalam membangun kesepahaman bersama mengenai urgensi pendirian BUMDes sebagai instrumen pengelolaan potensi lokal secara kolektif dan berkelanjutan.

Pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yakni observasi partisipatif, wawancara informal, dan dokumentasi. Observasi partisipatif digunakan untuk mencermati dinamika interaksi sosial, tingkat partisipasi, serta respons masyarakat selama pelaksanaan sosialisasi, pemanfaatan media inspiratif, dan forum diskusi kelompok terarah (FGD). Wawancara informal dilakukan secara dialogis dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat berdasarkan kesediaan, guna menggali pandangan, pengalaman, dan harapan masyarakat terkait kondisi ekonomi lokal serta urgensi pembentukan BUMDes. Dokumentasi berupa catatan lapangan, foto kegiatan, notulen FGD, dan dokumen kelembagaan digunakan sebagai data pendukung. Penggunaan ketiga teknik tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan triagulasi data, sehingga pengalaman mengenai proses partisipasi masyarakat, pembentukan kesepahaman kolektif, dan legitimasi sosial BUMDes dapat diperoleh secara komprehensif.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, dan penyajian narasi tematik. Kategorisasi dilakukan dengan memusatkan perhatian pada pola partisipasi masyarakat, pembentukan kesepahaman kolektif, serta dinamika legitimasi kelembagaan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan pengabdian. Proses analisis ini memungkinkan identifikasi hubungan antar-tema serta pemaknaan atas dinamika sosial yang muncul dalam proses penguatan ekonomi desa. Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan visi kolektif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disepakati oleh masyarakat dan pemerintah desa.

Tabel 1 Logika intervensi

Masalah yang di Intervensi: Belum tersedianya lembaga ekonomi desa yang berperan sebagai motor penggerak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat .		
	Logika intervensi	**Indikator objektif**
Goals	BUMDes menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat	Terbentuknya kelembagaan ekonomi desa yang mampu menggerakkan potensi lokal.
Outcome	Berdirinya BUMDes yang ditopang oleh Visi Kolektif Masyarakat	Dokumen pendirian BUMDes yang ditopang oleh kesepakatan bersama warga dan perangkat desa.
Output	Adanya ketetapan Visi Kolektif BUMDes yang dirumuskan oleh seluruh elemen pemerintah dan masyarakat desa	Dokumen visi kolektif yang dirumuskan bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga
Program	Sosialisasi tentang pentingnya pendirian BUMDes	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi yang partisipatif
		Terlaksananya pemutaran film BUMDes sukses yang memotivasi warga
		Terlaksananya FGD yang menghasilkan rumusan visi kolektif

(Sumber: Rancangan tim pengabdi, 2025)

Tabel 1 menyajikan logika intervensi yang kemudian diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Uraian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

Tahapan awal kegiatan dilakukan melalui observasi lapangan dan dialog bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Kambiyain. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat serta mengidentifikasi kebutuhan utama warga dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Proses identifikasi dilakukan secara agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi sejak tahap awal perencanaan kegiatan.

2. Pemetaan Potensi dan Permasalahan Desa

Tahap selanjutnya adalah pemetaan potensi dan permasalahan desa yang dilakukan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat. Pemetaan ini mencakup potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta peluang usaha yang dapat dikembangkan melalui kelembagaan ekonomi desa. Pada saat yang sama, tim pengabdi bersama masyarakat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan potensi tersebut, baik dari aspek kelembagaan, pengetahuan, maupun akses terhadap pasar dan informasi. Tahap ini bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai posisi dan kapasitas desa dalam mengembangkan BUMDes secara realistis.

3. Pemantapan Kesepahaman Awal bersama Pemangku Kepentingan Desa

Berdasarkan hasil pemetaan potensi dan permasalahan, dilakukan pemantapan kesepahaman awal bersama pemangku kepentingan desa. Tahapan ini diarahkan untuk menyelaraskan pandangan mengenai urgensi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta arah pengembangan kelembagaan ekonomi desa. Pemantapan kesepakatan ini menjadi fondasi penting sebelum dilaksanakannya kegiatan sosialisasi secara lebih luas kepada masyarakat.

4. Perancangan dan Persiapan Sosialisasi tentang Pentingnya Pendirian BUMDes

Tahap perancangan persiapan sosialisasi dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat Desa Kambiyain. Pada tahap ini, tim pengabdi menyiapkan materi, metode, serta media sosialisasi yang sesuai dengan hasil pemetaan dan kesepahaman awal yang telah dibangun. Materi sosialisasi difokuskan pada konsep dasar BUMDes, tujuan pendirian, dan manfaat kelembagaan ekonomi BUMDes bagi penguatan ekonomi desa. Selain itu, tim pengabdi juga menyiapkan media inspiratif, seperti bahan visual dan film dokumenter mengenai praktik BUMDes yang berhasil di daerah lain. Tim juga melakukan koordinasi teknis dengan pemerintah desa terkait jadwal dan lokasi pelaksanaan. Dengan persiapan yang matang, kegiatan sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendorong terciptanya ruang dialog yang produktif mengenai urgensi BUMDes.

5. Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pentingnya Pendirian BUMDes

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa Kambiyain dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Kambiyain. Sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi secara interaktif dan pemanfaatan media inspiratif berupa pemutaran film dokumenter mengenai keberhasilan BUMDes di daerah lain. Penggunaan media inspiratif dimaksudkan untuk membangun motivasi, memperluas wawasan, serta memicu diskusi kritis masyarakat mengenai kemungkinan pengembangan BUMDes di Desa Kambiyain.

Tahapan terakhir kegiatan adalah pelaksanaan *forum group discussion* (FGD) berfungsi sebagai ruang deliberatif masyarakat. Melalui FGD, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, aspirasi, serta gagasan terkait visi, nilai, dan arah pengelolaan BUMDes. Diskusi difasilitasi oleh tim pengabdi untuk memastikan partisipasi yang inklusif dan dialog yang konstruktif. Dengan kombinasi metode tersebut, sosialisasi dirancang tidak

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

hanya sebagai sarana transfer informasi, tetapi juga sebagai forum untuk membangun kesepahaman kolektif mengenai pentingnya BUMDes bagi Desa Kambiyain. Hasil *forum group discussion* (FGD) inilah yang kemudian menjadi visi kolektif BUMDes sebagai *output* utama kegiatan pengabdian.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dirancang sebagai proses sosial yang menekankan pembangunan partisipasi dan kesepahaman kolektif masyarakat Desa Kambiyain dalam penguatan kelembagaan ekonomi desa. Pendekatan partisipatif digunakan bukan sekadar sebagai strategi pelaksanaan kegiatan, melainkan sebagai mekanisme untuk menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam merumuskan makna, kebutuhan, dan arah pengelolaan potensi ekonomi lokal. Pelaksanaan program dilakukan melalui serangkaian tahapan, sebagaimana dijelaskan pada bagian metode. Melalui rangkaian kegiatan yang telah diuraikan pada bagian metode, program ini diarahkan untuk membangun fondasi sosial dan kelembagaan yang memungkinkan terbentuknya legitimasi bersama terhadap pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen pengelolaan ekonomi desa yang kolektif dan berkelanjutan. Berdasarkan kerangka tersebut, uraian pelaksanaan program selanjutnya disajikan dalam dua kegiatan utama, yaitu:

a. Sosialisasi tentang pentingnya pendirian BUMDes

Kegiatan sosialisasi tentang pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilaksanakan di Balai Adat Dewata Desa Kambiyain dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga dari berbagai lapisan. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan proses identifikasi kebutuhan serta pemetaan potensi dan permasalahan desa melalui observasi lapangan dan dialog partisipatif. Pada tahap awal ini teridentifikasi bahwa stagnasi ekonomi desa bukan disebabkan oleh ketiadaan sumber daya alam maupun manusia, oleh belum adanya kelembagaan ekonomi yang mampu mengelola potensi lokal secara kolektif dan berkelanjutan.

Temuan tersebut kemudian menjadi dasar dilakukannya pemantapan kesepahaman awal bersama pemangku kepentingan desa. Proses ini bertujuan menyelaraskan persepsi mengenai urgensi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta perannya sebagai instrumen strategis penggerak ekonomi desa. Kesepahaman awal yang terbentuk berfungsi sebagai prasyarat sosial sebelum pelaksanaan sosialisasi secara luas kepada masyarakat.

Tahapan sosialisasi dilaksanakan sebagai ruang pembelajaran kolektif yang dirancang untuk membangun pemahaman kritis masyarakat mengenai kondisi ekonomi desa, potensi lokal yang belum terkelola secara optimal, serta peran strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen pengelolaan ekonomi kolektif. Penyampaian materi tidak hanya berfungsi sebagai transfer informasi, tetapi diarahkan untuk memantik refleksi masyarakat terhadap pengalaman ekonomi sehari-hari yang selama ini dijalankan secara individual dan terfragmentasi. Pemanfaatan media inspiratif berupa pemutaran film dokumenter yang menampilkan praktik baik pengelolaan BUMDes di desa lain berfungsi sebagai alat pedagogis yang menghadirkan contoh konkret, sekaligus membuka ruang imajinasi kolektif mengenai kemungkinan pengelolaan ekonomi desa yang lebih terorganisasi dan berkelanjutan. Melalui kombinasi pemaparan konseptual dan media visual tersebut, proses sosialisasi menjadi sarana awal pembentukan kesadaran bersama yang memperkuat kesiapan masyarakat untuk memasuki tahapan deliberasi dan perumusan visi kelembagaan BUMDes.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang berfungsi sebagai ruang deliberatif bagi masyarakat untuk menegosiasikan gagasan,

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

kepentingan, dan harapan terkait pembentukan BUMDes. FGD dirancang tidak hanya sebagai forum diskusi teknis, melainkan sebagai mekanisme sosial untuk membangun kesepahaman kolektif melalui pertukaran pandangan dan pengalaman antar warga. Dalam proses ini, masyarakat aktif mengartikulasikan aspirasi, mengemukakan kekhawatiran, serta merumuskan nilai dan arah pengelolaan BUMDes yang dianggap relevan dengan kondisi sosial ekonomi desa. Dinamika deliberatif yang berlangsung menunjukkan bahwa proses dialog terbuka mampu memperkuat rasa kepemilikan bersama serta menggeser posisi masyarakat dari sekadar penerima program menjadi subjek pengambilan keputusan. Dengan demikian, FGD berperan penting dalam mentransformasikan pemahaman individual menjadi komitmen kolektif, yang selanjutnya menjadi fondasi legitimasi sosial bagi pembentukan dan keberlanjutan kelembagaan BUMDes di Desa Kambiyain.

Jika dibandingkan dengan kegiatan awal (*baseline*), sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pemahaman masyarakat Desa Kambiyain mengenai konsep, fungsi, dan mekanisme pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih bersifat terbatas dan cenderung normatif. Partisipasi warga dalam diskusi pengembangan ekonomi desa pada tahap awal juga relatif rendah, yang tercermin dari minimnya keterlibatan aktif dalam menyampaikan pandangan maupun aspirasi. Setelah rangkaian kegiatan dilaksanakan, terjadi perubahan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang ditunjukkan melalui meningkatnya intensitas dialog, keberanian mengemukakan pendapat, serta kemampuan warga mengaitkan BUMDes dengan persoalan ekonomi lokal yang mereka hadapi. Perubahan ini tidak semata dimaknai sebagai peningkatan pemahaman individual, melainkan sebagai proses awal pembentukan kesepahaman kolektif yang terlihat dari munculnya gagasan bersama mengenai arah kelembagaan ekonomi desa. Dengan demikian, capaian kegiatan pada tahapan ini dapat dipahami sebagai pergeseran dari kondisi pasif menuju partisipasi yang lebih reflektif dan deliberatif, yang menjadi fondasi penting bagi penguatan legitimasi sosial BUMDes di Desa Kambiyain.

Lebih jauh, proses sosialisasi dan FGD memberikan dampak sosial awal berupa terbentuknya legitimasi sosial terhadap gagasan pendirian BUMDes serta menguatnya modal sosial masyarakat, khususnya dalam aspek komunikasi, kepercayaan, dan ketersediaan untuk bekerja sama. Temuan ini sejalan dengan teori pembangunan yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sejak tahap awal merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan kelembagaan dan efektivitas program pembangunan desa.

Meskipun demikian, pendekatan sosialisasi dan deliberasi ini juga memiliki keterbatasan. Tidak seluruh warga dapat terlibat secara optimal karena keterbatasan waktu dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Selain itu, capaian kegiatan pada tahapan ini masih berfokus pada peningkatan pemahaman dan kesadaran, belum sampai pada perubahan ekonomi yang terukur secara kuantitatif. Namun, keterbatasan tersebut tidak mengurangi peran strategis sosialisasi sebagai fondasi awal pembangunan kelembagaan ekonomi desa, karena proses ini berhasil membangun kesepahaman kolektif dan legitimasi sosial yang menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan BUMDes di Desa Kambiyain.

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

Gambar 1 Kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pendirian BUMDes
(Sumber: Dokumentasi tim pengabdi, 2025)

b. Musyawarah perumusan dan penetapan visi kolektif BUMDes

Musyawarah perumusan dan penetapan visi kolektif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan sebagai bagian lanjutan dari rangkaian kegiatan penguatan kelembagaan ekonomi desa. Tahap ini diarahkan untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMDes memiliki arah kelembagaan yang jelas dan disepakati bersama oleh masyarakat serta pemerintah desa. Sebelum pelaksanaan musyawarah, terlebih dahulu dilakukan proses pembentukan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui mekanisme rekrutmen terbuka yang melibatkan masyarakat Desa Kambiyain.

Proses rekrutmen pengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diawali dengan mekanisme rekrutmen terbuka melalui pendistribusian formulir pendaftaran kepada warga desa secara langsung oleh tim pengabdi, guna membuka kesempatan partisipasi yang setara bagi seluruh masyarakat. Tahapan selanjutnya mencakup proses seleksi calon pengurus BUMDes yang dilakukan secara bertahap, meliputi seleksi administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian berkas pendaftar, penilaian melalui wawancara tertulis, serta wawancara langsung guna mengkaji kompetensi, komitmen, dan kesiapan calon dalam mengelola kelembagaan desa. Berdasarkan keseluruhan tahapan seleksi tersebut, ditetapkan struktur pengurus BUMDes yang dinilai memiliki kapasitas manajerial serta integritas dan berkomitmen kelembagaan untuk menjalankan fungsi BUMDes secara akuntabel dan berkelanjutan.

Setelah struktur kepengurusan BUMDes ditetapkan, pengurus terpilih bersama pemerintah desa menyusun rancangan visi kolektif BUMDes. Penyusunan rancangan visi ini dilakukan dengan merujuk pada aspirasi, gagasan, dan kebutuhan masyarakat yang telah dihimpun sebelumnya melalui kegiatan sosialisasi serta dan forum diskusi kelompok terarah (FGD), sehingga visi yang dirumuskan mencerminkan kesepahaman bersama dan kondisi riil masyarakat desa. Rancangan visi kolektif BUMDes tersebut kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga. Musyawarah dilaksanakan secara deliberatif, memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan masukan, menyempurnakan rumusan visi, serta menyepakati arah pengelolaan BUMDes secara kolektif.

Hasil langsung dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen visi kolektif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disepakati bersama dan selanjutnya dilembagakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes melalui Musyawarah Desa. Dibandingkan kondisi sebelum pelaksanaan program, di mana Desa Kambiyain belum memiliki struktur pengelolaan dan visi kelembagaan ekonomi desa yang dirumuskan secara partisipatif, pasca musyawarah masyarakat telah memiliki arah bersama yang jelas serta kepengurusan BUMDes yang memiliki legitimasi formal dan sosial.

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

Capaian awal kegiatan ini menghasilkan struktur kelembagaan BUMDes yang terbentuk melalui proses rekrutmen terbuka serta dokumen visi kolektif yang dilembagakan dalam AD/ART. Sebagai hasil lanjutan, kegiatan ini memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap BUMDes serta meningkatkan partisipasi warga dalam tata kelola kelembagaan ekonomi desa, khususnya pada tahap perencanaan dan perumusan arah kelembagaan. Dari sisi dampak awal, musyawarah dan proses rekrutmen terbuka berkontribusi pada penguatan kapasitas sosial masyarakat, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan kolektif. Temuan ini sejalan dengan teori tata kelola yang menekankan pentingnya mekanisme terbuka dan deliberatif dalam membangun kelembagaan lokal yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, capaian kegiatan pada tahap ini masih berfokus pada penguatan aspek kelembagaan dan sosial, sehingga dampak ekonomi yang terukur secara kuantitatif belum dapat diidentifikasi. Efektivitas visi kolektif dan struktur kepengurusan yang telah ditetapkan juga sangat bergantung pada konsistensi implementasi serta kapasitas pengelolaan BUMDes pada tahap selanjutnya. Kendati demikian, proses musyawarah dan rekrutmen terbuka ini telah membangun fondasi penting bagi pengelolaan BUMDes yang transparan, partisipatif, dan keberlanjutan di Desa Kambiyain.

Gambar 2 Kegiatan Musyawarah Desa Penetapan AD/ART BUMDes
(Sumber: Dokumentasi tim pengabdi, 2025)

2. Pencapaian Program

Berikut penjabaran capaian program pengabdian yang dilaksanakan:

Tabel 2 Capaian Program

	Capaian Program	Indikator objektif
Kegiatan	Sosialisasi tentang pentingnya pendirian BUMDes	Terlaksananya sosialisasi bersama masyarakat Desa Kambiyain yang dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa dengan jumlah peserta sebanyak 34 orang.
	Musyawarah Perumusan dan Penetapan Visi Kolektif BUMDes	Terlaksananya musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat menghasilkan dokumen visi kolektif BUMDes yang disepakati bersama.
Output	Adanya ketetapan Visi Kolektif BUMDes yang dirumuskan oleh	Terbentuknya dokumen resmi Visi Kolektif BUMDes yang ditandatangani oleh Ketua

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

	seluruh elemen pemerintah dan masyarakat desa	Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai dasar pendirian kelembagaan.
Objective/Outcome	Berdirinya BUMDes yang ditopang oleh Visi Kolektif Masyarakat	Terbitnya Surat Keputusan (SK) pendirian BUMDes, terbentuknya struktur organisasi, serta tersusunnya rencana kerja BUMDes awal.
Goals/Impact	BUMDes menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat	Mulainya kegiatan usaha BUMDes yang melibatkan warga, tercatat 9 orang pengelola dan masyarakat penerima manfaat, serta munculnya aktivitas ekonomi baru di desa

(Sumber: Rancangan tim pengabdi, 2025)

D. KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat di Desa Kambiyain, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, menghasilkan sejumlah capaian penting. Capaian utama program ini meliputi terselenggaranya rangkaian sosialisasi, pemanfaatan media inspiratif, forum diskusi kelompok terarah (FGD), terbentuknya struktur kepengurusan BUMDes melalui mekanisme rekrutmen terbuka, serta tersusunnya dan ditetapkannya dokumen visi kolektif BUMDes yang dilembagakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Hasil lanjutan dari pelaksanaan program ini ditunjukkan oleh meningkatnya pemahaman, partisipasi, dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kelembagaan ekonomi desa, yang tercermin dari keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks dampak sosial awal, program pengabdian ini berkontribusi pada penguatan modal sosial serta terbentuknya legitimasi kelembagaan BUMDes sebagai fondasi pengelolaan ekonomi desa yang dan berkelanjutan.

Ditinjau dari aspek metode, pendekatan yang dikombinasikan dengan strategi edukatif, pemanfaatan media inspiratif, dan ruang deliberatif menunjukkan keunggulan dan membangun kesadaran kolektif, legitimasi sosial, serta kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah desa. Namun demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena capaian program masih berfokus pada penguatan aspek sosial dan kelembagaan awal, sehingga dampak ekonomi yang terukur secara kuantitatif belum dapat diidentifikasi dan memerlukan pendampingan lanjutan. Oleh karena itu, direkomendasikan agar program pengabdian selanjutnya diarahkan pada penguatan kapasitas pengelolaan usaha dan evaluasi kinerja BUMDes secara berkelanjutan guna memastikan transformasi capaian sosial menjadi manfaat ekonomi lebih konkret bagi masyarakat desa.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada: 1) Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat; 2) Kepala Desa Kambiyain, atas izin, dukungan, dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan; 3) Seluruh perangkat Desa Kambiyain, yang telah membantu dalam penyediaan fasilitas dan koordinasi kegiatan di lapangan; dan 4) Masyarakat Desa Kambiyain, atas partisipasi aktif dan keterlibatan konstruktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

Aditya, T. P. (2025). Penguatan Legalitas BUMDes Bina Margaasih melalui Pendampingan Berbasis MBKM. *Community Empowerment : Jurnal Pengabdian*

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

Dan Pemberdayaan Masyarakat, *3*(2), 63–75. https://doi.org/10.15575/commen.v3i2.1668

Alwi, M., Suastika, I. N., & Lasmawan, I. W. (2023). Peran Bumdes Dalam Menopang Modal Usaha Kecil Menengah (UKM) Desa Tebaban. *Jurnal Istiqro*, *9*(2), 106–115. https://doi.org/10.30739/istiqro.v9i2.1818

Anu, M. A., Margareta paju, M., Kelen, V. boleng, Kleden, M., & H. Molan, K. S. (2025). Sosialisasi Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Olaia Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(4), 469–476. https://doi.org/10.59395/tq29vz73

Fernandes, D., Lake, P., Daeng, E., Lay, M. R., Long, B. L., & Peni, A. (2023). Sosialisasi Keberlanjutan BUMDes pada Daerah Perbatasan (BUMDes Pala Opat Desa Tubu Kabupaten Timor Tengah Utara). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *1*(9), 1868–1879. https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i9.432

Fikri Alfan, Diah Syifaul A'yuni, & Nadya Khoirun Nisa'. (2025). Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Menurut Ekonomi Islam. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, *2*(3), 330–348. https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1431

Fitriyani. (2025). Optimalisasi Peran BUMDes Dalam Peningkatan Perekonomian Desa Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *3*(4), 926–931. https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.477

Hardiyono, H., & Tikupadang, W. K. (2023). Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan Edupreneurship Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) LEMBANG PARINDING. *Indonesian Journal Of Economy Studies*, *1*(1). https://doi.org/10.63828/ijes.v1i1.30

Machmud, J., Imbran, H., & Baderan, U. S. (2025). Pengembangan Kapasitas BUMDES di Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, *4*(2), 77–84. https://doi.org/10.35912/jpe.v4i1.4876

Marlina, R., & Suwandi, Y. (2024). Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Bumdes Desa Cibodas Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, *08*(02), 129–137. https://doi.org/https://doi.org/10.52250/p3m.v8i2.574

Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). Efektivitas Sosialisasi sebagai Pendekatan dalam Program Sosial: Tinjauan Sistematis Literatur. *Share Social Work Journal*, *15*(1), 35–47. https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/63487

Pah, T. I. B. K., Lay, M. R., & Therik, J. J. (2024). Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Manekan Desa Oefeto Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang). *Jurnal Publik*, *18*(01), 01–10. https://doi.org/10.52434/jp.v18i01.271

Setiawan, D. (2021). BUMDes Untuk Desa: Kinerja BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian di Yogyakarta. *Journal of Social and Policy Issues*, 11–16. https://doi.org/10.58835/jspi.v1i1.4

Sunaryono, S. (2024). Analisis Pendapatan Lokal, Peluang Kerja, dan Diversifikasi Produk sebagai Pilar Keberlanjutan BUMDes. *Jurnal Ekonomi STIEP*, *09*(02), 95–104. https://doi.org/https://doi.org/10.54526/jes.v9i2.367

Sundari, A., Ainiyah, L., Haniyah, N. A., & Sari, M. P. D. (2025). Inovasi Bumdes dalam Memenuhi Kebutuhan Air Bersih di Desa Laren. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, *3*(2), 51–63. https://doi.org/10.35912/jpe.v3i2.4357

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS